

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BLUE LAGOON OLEH
PEMERINTAH KALURAHAN**

(Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun oleh:

Erwana Sayfudin
16520015

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BLUE LAGOON OLEH
PEMERINTAH KALURAHAN**

(Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Januari 2023

Waktu : 08.30 – 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Utami Sulistiana, S.P., M.P
Ketua Penguji/ Pembimbing



2. Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D
Penguji Samping 1



3. Ir. Nelly Tiurmida, MPA
Penguji Samping 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Erwana Sayfudin
NIM : 16520015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BLUE LAGOON OLEH PEMERINTAH KALURAHAN (Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Yang memuat pernyataan


 Erwana Sayfudin
NIM: 16520015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BLUE LAGOON OLEH PEMERINTAH KALURAHAN (*Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman*)”**. Penelitian *Deskriptif-Kualitatif* di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan juga arahan untuk skripsi ini.
4. Rr. Leslie Retno Angeningsih,Ph.D selaku dosen penguji telah banyak memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.

5. Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku dosen penguji telah banyak memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
7. Seluruh keluarga besar Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penulis



Erwana Sayfudin

NIM: 16520015

MOTTO

“Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih
Tanpo Bondo.”
(Sunan Kalijaga)

“Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat
berbahaya.”
(Ir. Soekarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta atas banyak ilmu dan perjalanan hidup yang banyak saya dapatkan.
2. Bu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam bimbingan skripsi ini hingga selesai.
3. Kedua orang tua, keluarga besar, sahabat, aboy, widoyo, dimas, tomi, faisal, irwansyah, afriansyah, vivin, awang, ita, sekar,hilda, syahbana, bima, feni, putri, ray, ari, Candy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian.....	8
E. Literatur Review.....	9
F. Kerangka Konseptual	17
1 Pariwisata Berkelanjutan	17
2 Desa Wisata	19
3 Pemerintah Desa	21
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
H. Metode Penelitian.....	29
1 Jenis Penelitian	29
2 Unit Analisis.....	30

3	Teknik Pengumpulan Data	32
4	Teknik Analisis Data	34
	BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	36
A.	Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman.....	36
B.	Blue Lagoon	45
	BAB III ANALISIS DATA	50
A.	Faktor Pendukung Pengembangan Wisata Blue Lagoon	52
B.	Kendala Dalam Pengembangan Wisata Blue Lagoon	61
C.	Kebijakan Pemerintah Kalurahan Widodomartani Dalam Pengembangan Objek Wisata Blue Lagoon.....	69
	BAB IV PENUTUP	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan	31
Tabel 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Widodomartani	40
Tabel 3 Daftar Nama Aparatur Pemerintah Kalurahan Widodomartani.....	42
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 6 Mata Pencaharian Masyarakat Widodomartani	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kalurahan Widodomartani.....	38
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengelola Blue Lagoon	49
Gambar 3 Keputusan Lurah Widodomartani tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di Lingkungan Widodomartani	72

INTISARI

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman dalam pengembangan objek wisata Blue Lagoon. Objek wisata Blue Lagoon telah resmi dikenal dan digolongkan menjadi desa wisata. Sempat mengalami penurunan pendapatan saat covid-19, namun mencoba bangkit kembali. Selama ini diketahui bahwasanya objek wisata Blue Lagoon dikelola oleh kelompok sadar wisata, namun belum lama intervensi pemerintah kalurahan Widodomartani juga telah diketahui. Untuk itu dilihat kebijakan pemerintah kalurahan Widodomartani dalam pengembangan objek wisata Blue Lagoon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor, kendala, dan kebijakan pemerintah kalurahan Widodomartani dalam pengembangan wisata Blue Lagoon. Peneliti menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan perspektif Government, ditemukan bahwasanya pemerintah kalurahan Widodomartani hanya dapat melakukan pemantauan, pendampingan, lebihnya sekedar menyarankan dan kerja sama untuk pengelolaan objek wisata Blue Lagoon dengan Pokdarwis yang didirikan melalui keputusan Lurah Widodomartani.

Hasil penelitian ini menjelaskan faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata Blue Lagoon dilakukan oleh beberapa pihak. Masyarakat local, pemerintah kalurahan Widodomartani, pemerintah kabupaten Sleman, pemerintah daerah DIY, dan Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif, serta kerja sama pihak ketiga seperti halnya dengan teh botol sosro oleh kelompok sadar wisata. Adapun faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Blue Lagoon berupa, kondisi alam yang dapat berupa banjir, hujan lebat, dan angin dan kondisi lingkungan berupa keterbatasan modal pengelola dan juga lahan untuk pengembangan masih dimiliki pribadi bukan tanah kas kalurahan.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah kalurahan Widodomartani berupa Keputusan Lurah Widodomartani Nomor 33/ Kep Lur/ 2022 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata “WISESA” Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman merupakan sebuah dukungan atas untuk pengelolaan Blue Lagoon. Pemerintah kalurahan Widodomartani melakukan pendampingan dan sebatas memberikan saran dalam pengelolaan objek wisata Blue Lagoon. Lebih pemerintah kalurahan Widodomartani juga ikut membantu dalam memberikan akses kerja sama. Maka dari itu, mensinergikan pengelolaan dengan BUMDesa adalah sebuah jalan mulia untuk kemaslahatan warga desa Widodomartani.

Kata kunci: Pemerintah Kalurahan, Blue Lagoon, dan Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara, seperti Indonesia yang kaya akan potensi dan sumberdaya yang sangat besar terhadap industri pariwisata di dalamnya. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 11 menyebutkan bahwa, “Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Kepariwisataan menjadi salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara legitimasi kedudukan desa sangat kuat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan untuk mengangkat potensi desa sebagai ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, desa sebagai masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) atau pemerintahan berbasis masyarakat telah membentuk desa sebagai kesatuan (entitas) hukum yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan (Eko, 2015:45). Konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*), dalam tata kelola pemerintahan desa, desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan desa. Dengan kalimat lain, hitam putihnya wajah desa tergantung pada apa yang dikerjakan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pada pasal 1 ayat (2) ini dapat dilihat dua kata kunci dalam proses penyelenggaraannya, yaitu: pertama, urusan pemerintahan, dan kedua, kepentingan masyarakat. Artinya, apa yang diurus di dalam proses pemerintahan pada hakikatnya adalah pengelolaan kepentingan masyarakat agar dimasukkan ke dalam program pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Apabila kepentingan masyarakat sebagai *input* maka penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses, dan *outputnya* adalah aneka hasil pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan budayanya. Hingga sekarang Yogyakarta masih tetap merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia maupun Mancanegara. Berdasarkan laporan dari Dinas Pariwisata DIY pada tahun 2020 Jumlah Wisatawan Mancanegara sebanyak 64.757 orang, sedangkan Wisatawan Nusantara sebanyak 10.765 orang dengan jumlah keseluruhan wisatawan mencapai 10.830.143 orang. Dari keseluruhan jumlah wisatawan, jumlah tertinggi ada diwilayah Kabupaten Sleman yang mencapai sebanyak 4.250.119 wisatawan, kemudian diikuti Kabupaten Bantul sebanyak 2.265.423 wisatawan, Kabupaten Gunungkidul 1.981.599 wisatawan, Kota Yogyakarta 1.366.570 wisatawan, dan jumlah paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo sebanyak 966.423 wisatawan.

Terkait penyelenggaraan kepariwisataan, kepariwisataan selaras dengan tujuan kemandirian desa, dimana dapat diperpadukan antara pariwisata dan desa, keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, hal ini dapat dilihat dari hadirnya desa wisata yang menjadi *trend* alternatif, sebagaimana laporan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia saat menyelenggarakan rangkaian acara yang diselenggarakan dalam bentuk Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) bahwa pada tahun 2021 terdapat desa wisata sebanyak 1.831 desa. Jumlah ini melebihi target awal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) yang hanya 700 peserta. Adanya Anugerah Desa

Wisata Indonesia tidak bisa dipisahkan dari harapan pemerintah akan kebangkitan desa wisata di Indonesia (<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Anugerah-Desa-Wisata-Indonesia-2021-Telah-Memasuki-Babak-Baru>). Menurut Anindita (2015) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebih baik dan menarik ditinjau dari segi tempat dan segala yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya, sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY pada tahun 2022 terdapat jumlah desa wisata sebanyak 165 desa wisata. Jumlah desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta naik sebanyak 17 desa pada tahun 2021 yakni jumlah desa wisata sebesar 148 desa.

Salah satu diantara desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Desa Wisata Blue Lagoon. Desa wisata ini terletak di Dusun Dalem, Desa Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Desa wisata ini merupakan dusun yang bernama Dusun Dalem sehingga cakupan wilayahnya tidak begitu luas. Nama Desa Wisata Blue Lagoon berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti air berwarna biru. Pemberian nama tersebut diberikan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yang sebelumnya warga desa sekitar menyebut pemandian alam sungai tersebut dengan nama tirta budi. Desa wisata Blue Lagoon merupakan salah satu desa wisata baru yang diresmikan menjadi desa wisata sejak tahun 2015. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu mengangkat dan

mengembangkan potensi yang ada di desa wisata Blue Lagoon agar menjadi lebih maju, serta menjadikan salah satu tujuan utama wisata air di Kabupaten Sleman.

Wabah pandemi Corona Virus Disease-2019 atau yang selanjutnya disebut Covid-19 telah menghancurkan semua sektor perekonomian, termasuk sektor pariwisata tanah air. Indonesia selama dua tahun terakhir masih dihadapkan dengan kondisi tidak pasti yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Sampai tanggal 25 April 2022, Indonesia telah melaporkan 6.044.467 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Angka kematian Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 156.133 kematian. Sementara itu, diumumkan 5.875.083 orang telah sembuh, menyisakan 13.251 kasus yang sedang dirawat (<https://covid19.go.id/artikel/2022/04/25/situasi-covid-19-di-indonesia-update-25-april-2022>), sedangkan di Kabupaten Sleman terkonfirmasi kasus Covid-19 pada tanggal 23 April 2022 sebanyak 76.101 mengalami peningkatan pada tanggal 24 April 2022 sebanyak dua orang atau sejumlah 76.103 (<https://corona.slemankab.go.id/index.php/category/pasien/>). Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini

diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level pada tahun 2021 hingga 2022. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah masuk level 2 sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta masuk level 2 di sejumlah kabupaten yang ada di D. I. Yogyakarta termasuk di Kabupaten Sleman yang berlaku mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 dikum keempat dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut: “ huruf (j) fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara; (k). akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan; 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 5) penerapan ganjil –

genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat”.

Beberapa tempat wisata termasuk desa wisata Blue Lagoon, merasakan dampak yang terjadi akibat kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, hal tersebut membuat pengelola takut kehilangan wisatawan lagi seperti saat penerapan PPKM Juli 2021 lalu, dimana kegiatan wisata Blue Lagoon mati total karena objek wisata harus tutup, sebagaimana rasa khawatir yang disampaikan oleh Suhadi selaku ketua pengelola Blue Lagoon “Jelas kami ketar-ketir karena pemerintah memberlakukan PPKM level 3 lagi Natal dan Tahun Baru nanti” (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/11/25/512/1089139/ketar-ketir-desa-wisata-sambut-ppkm-level-3>), selain itu, dipertegas oleh Sudaringsih selaku Kepala Dinas Kabupaten Sleman “Sebenarnya kita istilahnya bukan membuka kembali suatu tempat termasuk destinasi wisata tetapi uji coba terbatas ya. Ini berlaku tidak hanya di tempat wisata di Sleman saja, melainkan juga kafe, pusat perbelanjaan pasar dan lain sebagainya” (<https://jogja.suara.com/read/2020/08/23/173459/uji-coba-new-normal-di-desa-wisata-blue-lagoon-pengelola-siapkan-hal-ini?page=all>). Melalui

pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo “Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan *World Health Organization* (WHO) secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia”. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait pengembangan wisata Blue Lagoon yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pengembangan Desa Wisata Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Terhadap Wisata Blue Lagoon Di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pengembangan objek wisata Blue Lagoon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengembangan objek wisata Blue Lagoon.

3. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kalurahan Widodomartani dalam pengembangan objek wisata Blue Lagoon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka bagi peneliti dan peneliti lainnya yang berminat terhadap pembahasan tentang pengembangan desa wisata, dan terutama bagi pegiat desa secara umum untuk dapat meningkatkan dan memperkaya keilmuan di dalam bidang disiplin ilmu pemerintahan terkhusus penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pegangan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang penulis peroleh dibangku perkuliahan, serta penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai literatur kepada masyarakat secara umum maupun pegiat desa lainnya khususnya dalam merespon potensi desa terhadap pengembangan desa wisata.

E. Literatur Review

1. Penelitian yang dilakukan Hafni Khairunisa berjudul 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Blue Lagon, Sleman Yogyakarta' dimuat dalam jurnal Islamic Management and Empowerment Journal, Volume 1, Nomor 2, 2019 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan

pariwisata oleh masyarakat blue lagon. Data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil dalam penelitian ini diketahui bahwa strategi yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan wisata blue lagon dengan membentuk panitia pengelola desa wisata, membuat paket wisata, pembangunan sarana pendukung, program promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

2. Penelitian yang dilakukan Arif Dwi Saputra berjudul 'Implementasi Penerapan Protokol New Normal Pada Destinasi Wisata Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta' yang dimuat dalam jurnal Media Wisata, Volume 19, Nomor 2, November 2021 bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan protokol new normal bagi destinasi wisata di Kabupaten Sleman serta mengecek kondisi nyata kesiapan destinasi untuk dibuka kembali, sekaligus melihat kepatuhan wisatawan terhadap regulasi protokol new normal di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode survei. Pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, kuesioner, dan studi literatur. Penelitian ini ada di 8 titik wisata di Sleman dan dilakukan selama 24 hari, Blue Lagon adalah salah satunya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pariwisata di Sleman dapat dibuka kembali untuk kebaikan peningkatan perekonomian masyarakat, namun dilakukan dengan pengawasan ketat dalam penerapan protokol kesehatan.

3. Penelitian yang dilakukan Susi Febriani berjudul ‘Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata Blue Lagon Dalem Widodomartani Ngemplak Sleman dimuat dalam Journal Student Uny.ac.id bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata Blue Lagon dan tingkat partisipasi masyarakat di wisata Blue Lagon. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan populasi 130 kepala rumah tangga di dusun Dalem. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik probability random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Data dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini terdapat banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan pariwisata, kemudian tingkat partisipasi dalam kegiatan pariwisata di Blue Lagon masuk dalam kategori sedang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syarifah dan Agus Rochani berjudul ‘Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat’ dimuat dalam Jurnal Kajian Ruang Volume 1, Nomor 1, Maret 2021 bertujuan untuk mengetahui pengembangan wisata yang menggunakan konsep community based tourism serta dampak dari penerapan community based tourism bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Penelitian ini mengambil enam wilayah yang dijadikan sebagai

pembandingan pada wilayah studi yaitu desa wisata pandansari, desa wisata candirejo, desa wisata pentingsari, desa wisata kaki langit. Dalam penelitian ini pengembangan desa wisata yang menggunakan konsep community based tourism dimana melibatkan masyarakat daerah desa wisata untuk mengelola desa wisata tersebut dan masyarakat memiliki keterlibatan secara penuh dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi serta dampak bagi perekonomian masyarakat dengan adanya desa wisata yang semakin membaik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Harne Julianti Tou, Melinda Noer, dan Sari Lenggoeni berjudul 'Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan' dimuat dalam Jurnal REKAYASA volume 10 nomor 02, halaman 95-101, 2020 bertujuan mengidentifikasi dan meninjau studi literatur yang berkontribusi pada pemahaman tentang pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal yang merupakan bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang berkaitan dengan desa wisata, kearifan lokal dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ada 3 kerangka konsep yang digunakan, yakni kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata, pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengembangan desa wisata yang berkearifan lokal merupakan bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nadinda Shinta Fahira, Rusdianto Umar, dan Muhammad Mujtaba Habibi berjudul ‘Peran Pemerintah Desa Purworejo Dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri’ dimuat dalam Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, volume 3, nomor 2, 2022 bertujuan untuk menjelaskan latar belakang pengembangan wisata Sumber Complang, peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang, faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan wisata alam Sumber Complang. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis datanya, menggunakan cara analisis Interaktif Miles dan Huberman. Hasil kajian menjelaskan bahwa latar belakang pengembangan wisata Sumber Complang karena desa Purworejo memiliki potensi wisata yang indah dan ada dukungan dana dari APBN. Peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Sumber Complang sebagai motivator, dinamisator, dan fasilitator. Faktor pendukung ialah SDA, aksesibilitas, masyarakat, media sosial, keamanan, faktor penghambat ialah SDM, kebersihan, anggaran, tidak bekerja sama dengan pihak swasta, kurang media promosi, upaya yang dilakukan pelatihan dan sosialisasi, memperbaiki media promosi, mencari investor.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mutjaba Habibi berjudul ‘Sinergi Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’ dimuat dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, volume 7, nomor 2, halaman 429-437, 2022 bertujuan untuk mendeskripsikan program pengembangan desa wisata, sinergi peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Semen Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pengembangan desa wisata meliputi pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana dan pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh sinergi pemerintah desa melalui eksplorasi potensi dan masyarakat sebagai koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi penghasilan, pemukiman yang bersih, tingkat pendidikan, serta terpenuhinya fasilitas kesehatan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Wahyuning Tyas dan Maya Damayanti berjudul ‘Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa

Wisata Batik di Kabupaten Sragen' dimuat dalam *Journal Regional and Rural Development Planning*, volume 2, nomor 1, februari 2018, bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan Desa Kliwonan sebagai desa wisata batik berdasarkan kajian aspek sediaan dan aspek permintaan sehingga mampu memberi rekomendasi bagi pengembangan Desa Kliwonan. Penelitian ini menggunakan metode campuran, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif untuk melihat aspek sediaan dan kuantitatif untuk melihat aspek permintaan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Menggunakan analisis data deskriptif dan scoring, hasil penelitian ini menunjukkan ternyata Desa Kliwonan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata batik, namun saat ini masih belum siap untuk menjadi desa wisata. Karena, dalam aspek kesediaan masih diperlukan perbaikan dan pengembangan pada elemen aksesibilitas, amnesti, dan informasi kelembangaan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Itah Masitah berjudul 'Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran' dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, volume 6, nomor 3, september 2019 berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang belum optimal. Penelitian ini mengangkat pertanyaan bagaimana proses pengembangan desa wisata, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang

menggambarkan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Hasil penelitian ini menemukan jikalau pengembangan desa wisata dilaksanakan kurang baik berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Hambatannya adalah masalah anggaran dan dukungan masyarakat. Upaya yang selama ini dilakukan adalah promosi terhadap keberadaan desa wisata, memberikan dukungan anggaran yang dapat membantu pengelola, dan meningkatkan kerjasama.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Budhi Pamungkas Gautama, Ayu Krishna Yuliawati, Netti Siska Nurhayati, Endah Fitriyani, Ilma Indriasri Pratiwi, berjudul 'Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat' dimuat dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat, volume 1, nomor 4 oktober 2020 menggambarkan kajian potensi pengembangan desa wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang masih perlu peningkatan pengetahuan sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah survey awal, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Dengan metode tersebut diharapkan dapat turut membantu mengembangkan desa wisata dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam mengelola desa wisata, selain itu artikel ini juga menjelaskan pentingnya literasi desa wisata untuk masyarakat sebagai pemegang peran penting dalam mengembangkan desa wisata.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang berlokasi Blue Lagon, lebih banyak mengulas pengembangan wisata berbasis masyarakat

dan penerapan wisata pada saat pandemi covid 19. Kemudian, penelitian yang membahas peranan pemerintah desa dalam pengembangan wisata desa meliputi berbagai strategi yang berbeda-beda. Metode penelitian yang banyak digunakan adalah deskriptif kualitatif. Meskipun juga ada yang menggunakan kuantitatif dan campuran. Namun, metode pengambilan data banyak yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kebaruan dalam rancangan penelitian ini adalah pengembangan wisata blue lagon yang berlokasi di Desa Widodomartani berbasis pariwisata berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, dari berbagai pencarian judul yang mendekati, belum ada judul yang sama dalam penelitian yang dilakukan berlokasi di Blue Lagon. Metode penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, meskipun pengambilan datanya sama.

F. Kerangka Konsepsetual

1. *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan)

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan).

Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1955) menekankan bahwa pariwisata harus didasarkan pada kriteria yang berkelanjutan yang intinya adalah pembangunan harus didukung secara ekologis dalam jangka panjang dan sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat lokal. *Federation of Nature and National Parks* (1993) memberi batasan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah semua bentuk pembangunan, pengelolaan dan aktivitas pariwisata yang memelihara integritas lingkungan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan dari sumber daya alam dan budaya yang ada untuk jangka waktu yang lama (Arida, 2017).

Tujuan dasar dari pariwisata berkelanjutan adalah tercapainya keseimbangan antara lingkungan pariwisata, kebutuhan lokal masyarakat, dan kebutuhan wisatawan (Sharpley, 2006 dalam Sulistyadi *et al.*, 2019: 2). Prinsip-prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosio-budaya dalam pembangunan kepariwisataan, dan keseimbangan yang sesuai harus dibentuk antara ketiga dimensi tersebut untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014).

Dalam menjalankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, minimal tidak ada 3 (tiga) hal yang perlu dijalankan. *Pertama*, memanfaatkan sumber daya lingkungan, yang menjadi elemen kunci

dalam pembangunan kepariwisataan secara optimal, menjaga proses ekologi penting dan membantu mengkonservasikan pusaka alam dan keaneka-ragaman hayati. *Kedua*, menghormati keotentikan sosio-budaya dan komunitas tuan rumah, melestarikan pusaka buatan dan kehidupan budaya masa kini, nilai-nilai tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya dan toleransi. *Ketiga*, pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang mendapat informasi, dan juga kepemimpinan politis yang kuat untuk menjamin adanya partisipasi yang luas dan terbangunnya konsensus (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014).

Oleh karena itu, tujuan besar dari pariwisata berkelanjutan adalah untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan perdesaan yang menjadi elemen penting dengan menghadirkan kebijakan tegas dan komitmen penghapusan kemiskinan, menciptakan pekerjaan, melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, memperbaiki kehidupan lokal dengan memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran destinasi dan komunitas, dan kesetaraan gender yang dilihat dari manajemen pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014).

Konsep pariwisata berkelanjutan dalam skripsi ini diletakkan dalam melihat Blue Lagoon sebagai destinasi wisata alami yang secara ekologis pada pelestarian lingkungan (sungai). Kemudian, aktivitas masyarakat dalam artian partisipasi yang dihadirkan untuk menunjang aktivitas

ekonomi. Ditambah lagi, partisipasi pemangku kebijakan (pemerintah desa) dalam mengelola dan mengembangkan guna sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2. Desa Wisata

Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut (Sudibya, 2018). Seiring berjalannya trend peralihan dari wisata massal menuju wisata alternatif, dan dengan dukungan penuh terhadap konsep pariwisata berkelanjutan, maka desa wisata diuntungkan dalam pengembangan pariwisata.

Dalam kacamata kementerian pariwisata, desa wisata merupakan wilayah administratif yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya (Pedoman Desa Wisata, 2019). Dapat dilihat dari sini, bahwasanya desa wisata sejatinya menjadi salah satu komponen penting bagi penopang ekonomi masyarakat. Sehingga, konsep desa wisata bukan hanya sebatas labeling sebuah desa, melainkan menjadi kekuatan penggerak dan locus ekonomi sekaligus aset desa.

Kementrian Pariwisata menggolongkan beberapa jenis-jenis desa wisata, salah satunya adalah desa berbasis keunikan sumber daya alam. Desa wisata ini adalah desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya. Selain itu juga, terdapat 2 (dua) hal dalam pengembangan desa wisata, yakni pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Pedoman Desa Wisata, 2019).

Dalam konsep ini, 'Blue Lagon' dilihat sebagai sebuah bentuk keunikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Widodomartani, Kepanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Sebagaimana aset kepariwisataan yang berbasis potensi, daya tariknya dapat dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi. Selain itu, dalam upaya pengembangannya, diletakan dengan pendekatan pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2003:3) menegaskan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, secara vertical desa merupakan sistem pemerintahan terendah. Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode dan sistem

pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah (Muhadam Labolo, 2014:18).

Menurut Sutoro Eko (2015:46) menyatakan bahwa, desa merupakan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawa dalam tata pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. “Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Istilah “bawah” juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. Istilah “depan” berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan

warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, “dekat” berarti bahwa desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Menurut Rasyid dalam (Muhadam Labolo 2011:35) pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Supriyanto, 2009: 24).

Pemerintah desa dengan masyarakat desa merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan dari bagian atas keseluruhan interaksi sosial terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Koiman (dalam Harbani, 2017:250) menegaskan bahwa serangkaian hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan. Hubungan antara

pemerintah dengan masyarakat merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut (*good governance*) dengan melibatkan pengambilan kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999).

Dalam konteks masyarakat Hunt dan Walker (Dalam Sahid, 2011: 329) menjelaskan bahwa integrasi sosial adalah situasi dalam di mana semua warga dari masyarakat bersangkutan ikut berpartisipasi secara bebas dalam bentuk interelasi sosial tanpa memandang afiliasi etnis. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban keterlibatan terkait dengan keputusan/gagasan masing-masing, baik secara langsung atau tidak langsung berupa melewati suatu lembaga perwakilan resmi untuk melakukan substitusi kepentingan yang dikemukakan. Partisipasi keseluruhan diupayakan berdasarkan keyakinan seluruh anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam hal berkumpul dan berpendapat, maupun dalam hal berkontribusi sesuai tujuan yang dicapainya. Maka dari itu, partisipasi aktif oleh masyarakat mampu mewujudkan kepercayaan untuk berperan serta dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini integritas berhubungan dengan pandangan kepercayaan politik karena sebagai instansi pemerintah membuat peraturan yang berulang kali, dan kurangnya integritas

menimbulkan ketidakpercayaan untuk waktu yang lama, sehingga setiap organisasi dan peraturan juga merupakan tindakan potensial dapat menumbuhkan rasa kepercayaan.

Sementara *United National Development Planning* (dalam Rosidin, 2010:179) keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, antara lain: (1) Partisipasi (*participation*) sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi. (2) Penegakan Hukum (*Rule of law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *Good Governance* adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya

(*human ware*). (3) Transparansi (*Transparancy*) salah satu karakteristik *Good Governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi. (4) Daya Tanggap (*Responsiveness*) sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (*stake holder*). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. (5) Berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*), kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam *Good Governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah

untuk mufakat. (6) Keadilan (*equity*), melalui prinsip *Good Governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan. (7) Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*), agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan *Governance* harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktifitasnya secara *monopolistic*. Tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi. (8) Akuntabilitas (*Accountability*), setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggung jawabkannya kepada publik. Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (*stake holder*), yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: akuntabilitas organisasi, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas professional, dan akuntabilitas moral. (9) Visi Strategis (*Strategic vision*), dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam *Good Governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketinggalan. Visi itu, dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antara 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Rosidin, 2010:184).

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang di gunakan agar peneliti berfokus pada informasi data yang dibutuhkan sehingga tidak keluar atau melenceng dari tujuan penelitian terkait Pengembangan Desa Wisata Blue Lagon di Desa Widodomartani, Kepanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata Blue Lagon
2. Faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Blue Lagon.
3. Kebijakan (Pemerintah Desa Widodomartani) dalam Pengembangan objek wisata Blue Lagon.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya memiliki prinsip yang memuat Penelitian (research) merupakan suatu cara untuk menjawab dan

menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang teruji dan dipakai secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, sehingga hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Sebagaimana penjelasan Azwar (2015: 2), yaitu fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi. Metode penelitian kualitatif memiliki pendekatan beragam dalam melakukan penelitian, prosedur kualitatif mengandalkan data berupa teks, gambar dan memiliki cara yang berbeda dalam menganalisis data yang bersumber dari penelitian yang berbeda-beda, jenis penelitian ini peneliti menggunakan eksplanasi yakni penelitian yang mengkaji keterkaitan sebab akibat antara beberapa fenomena.

Penelitian yang bersifat eksplanasi dipergunakan dalam menentukan apakah suatu hubungan antara sebab dan akibat benar atau tidak, penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar dengan pendekatan kualitatif dan lebih memungkinkan untuk mengamati fenomena lebih

dekat dan mendalam dengan melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi kualitatif yang tertuju pada pemecahan masalah dengan menggambarkan fakta atau data secara empiris tentang Pengembangan Desa Wisata Blue Lagon.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata Blue Lagon, Kendala-kendala dalam pengembangan objek wisata Blue Lagon, Kebijakan (Pemerintah Kalurahan Widodomartani) dalam Pengembangan objek wisata Blue Lagon.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pengelola objek wisata blue lagon. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan cara teknik purposive yaitu, mengambil narasumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai faktor pendukung pengembangan wisata Blue Lagon, kendala dan kebijakan dari Pemerintah Kalurahan Widodomartani. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel I.I
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kapasitas Informan/ Jabatan
1	Heruyono, ST.	Lurah Widodomartani
2	Kismadi	Dukuh Dalem
3	Sahadi	Ketua Pengelola Blue Lagoon
4	Bayu	Pengelola Blue Lagoon
5	Marcel Pamungkas	Pengelola Blue Lagoon
6	Hariato	Pengelola Blue Lagoon
7	Gandung	Pengelola Blue Lagoon
8	Tuwuh Widodo	Pengelola Blue Lagoons
9	Paidi	Wisatawan Blue Lagoon
10	Asep Mulyana	Wisatawan Blue Lagoon
11	Joko Sumaryanto	Wisatawan Blue Lagoon
12	Dadang Mahendra	Wisatawan Blue Lagoon
13	Warjilah	Wisatawan Blue Lagoon

13 (tigabelas) informan tersebut dipandang memiliki kapasitas dan mengetahui secara langsung untuk memberikan informasi atas apa yang hendak diketahui oleh peneliti. Dari ketigabelas informan ini, nantinya akan berkembang sesuai dengan kondisi lapangan dan data yang didapat oleh peneliti.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini terletak di objek wisata Blie Lagon, Padukuhan Dalem, Desa Widodomartani, Kepanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Akan tetapi, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat saja memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Warwick dan Lininger (1975) dalam buku *The Sample Survey : Theory and Practice* menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses wawancara yaitu pewawancara, situasi wawancara, responden, dan isi pertanyaan.

Metode wawancara yang digunakan penulis ini merupakan wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tidak terencana (*unstandardized-interview*). Dalam mempersiapkan

wawancara berencana, pewawancara harus membuat interview guide yang digunakan sebagai pedoman saat melaksanakan wawancara.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan secara partisipatif dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan memperhatikan dan berpedoman terhadap tujuan penelitian. Manfaat penelitian dari observasi ini antara lain : (1) Peneliti dapat mengetahui ada/tidaknya kenyataan atau fakta kehidupan yang dicari dalam penelitian tersebut; (2) Peneliti dapat mengetahui kenyataan atau fakta kehidupan tersebut; (3) Peneliti dapat membuktikan konsep teori yang dibuatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari penggalian informasi. Teknik dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang didapatkan melalui media online maupun offline. Menurut Moleong (2002: 161), Dokumen ini adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dapat dipisahkan karena ada permintaan seorang peneliti. Sehingga, dokumen dapat berupa catatan, buku, teks, jurnal, makalah, memo, surat notulensi rapat dan sebagainya.

d. Triangulasi

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis eksplanasi. Menurut Patton, dkk dalam (Sutaryo, 2005:16) Data yang diperoleh dari penelitian yang dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran faktual yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Tahapan dari teknik analisis data ini, menurut Patton dan Lexy J. Moleong dalam (Sutaryo, 2005: 17) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dalam uraian dasar. Analisis data dalam penelitian kualitatif didalamnya mencakup proses identifikasi, klasifikasi, reduksi, komparasi, dan interpretasi. Kesemuannya ini di dalam kerangka triangulasi. Triangulasi yang

digunakan ialah triangulasi data (triangulasi sumber), peneliti mengumpulkan data dan menggunakan berbagai sumber data yang tersedia. Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisa. Analisa data ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu memilih data-data pokok yang sesuai dengan peneliti atau penulisan.
2. Penyajian data, yang bersifat naratif agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami sebelumnya.
3. Pengambilan keputusan dan verifikasi, yaitu penulis berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Keabsahan data yang dianalisis dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong 1999), dalam (Sugiyanto, 2010:6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat informasi dengan cara membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil data pengamatan.

BAB II

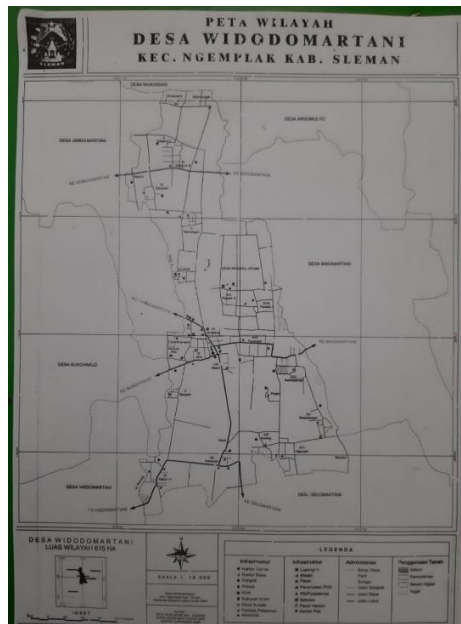
Gambaran Umum Kondisi Wilayah Penelitian

A. Gambaran Umum Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Sejarahnya kalurahan Widodomartani diambil dari namanya yakni Widodo dan Martani. Widodo berarti selamat dan Martani berarti pertanian. Jadi, arti dari Widodomartani kalurahan yang bagus untuk pertanian. Dalam berdirinya kalurahan ini didasari dengan Maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono IX tahun 1948. Kemudian, pada tahun 1951 terbentuklah kalurahan Widodomartani yang terdiri dari gabungan kalurahan Jeruksari, Dukusari, dan Kentisari. Kalurahan Widodomartani resmi berdiri tanggal 19 April. Hal ini telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hari Jadi Kalurahan.

Kalurahan Widodomartani memiliki luas wilayah kurang lebih 615ha. Kalurahan ini terdiri dari 19 padukuhan yang diantaranya; 1) Blambangan; 2) Kalijeruk 1; 3) Kalijeruk 2; 4) Ganjuran; 5) Klancingan; 6) Jimat; 7) Jangkang; 8) Dalem; 9) Jetis; 10) Banglen; 11) Kabunan; 12) Kemas; 13) Karang; 14) Ngalian; 15) Kwadungan; 16) Karanganyar; 17) Pucangan; 18) Pondok 1; 19) Pondok 2. Dengan padukuhan yang sangat banyak dan luas wilayah yang lumayan, tidak heran kalau kalurahan ini menjadi pusat di Kapanewon Ngemplak, Sleman, DIY. Adapun peta wilayah ada pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Peta Wilayah Kalurahan Widodomartani



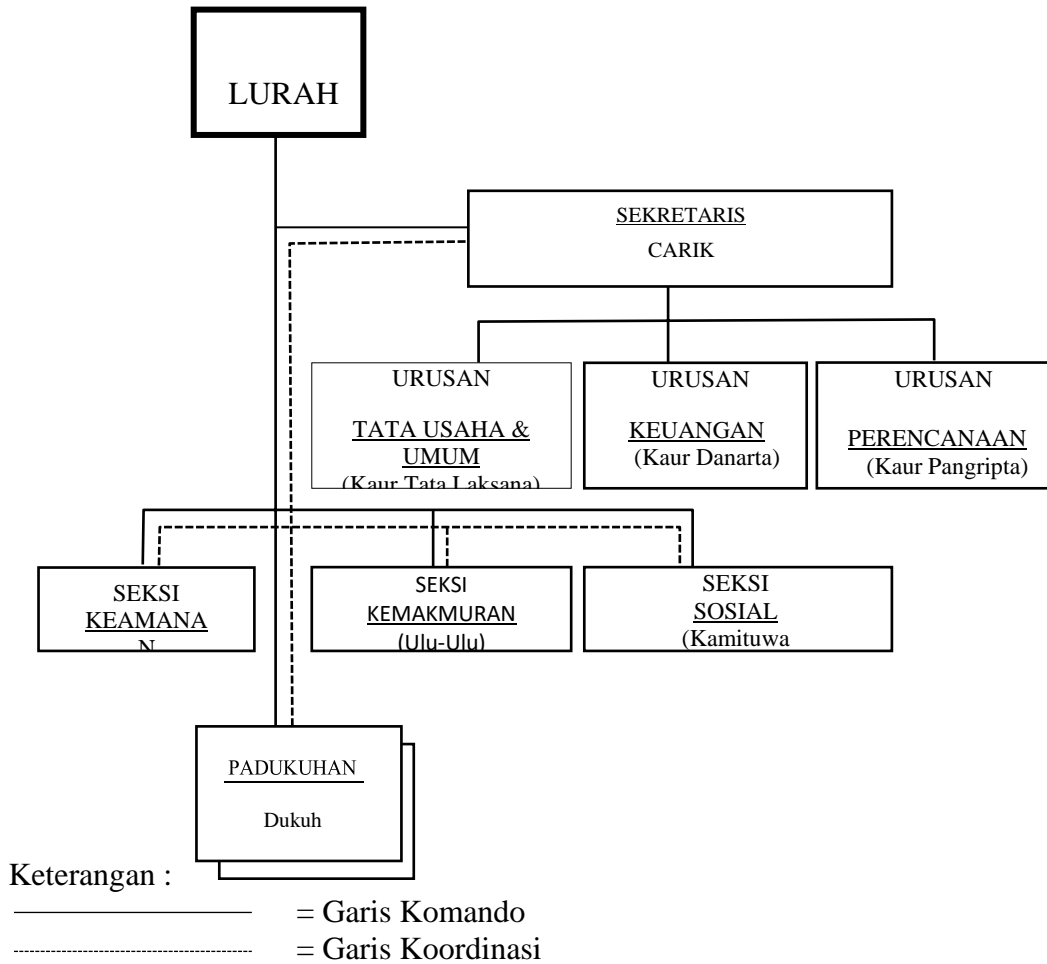
Sumber: Profil Kalurahan Widodomartani
(<https://widodomartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/3>)

Kalurahan Widodomartani, secara geografis koordinat bujur 110.4525 Bujur Timur dan koordinat -7.702 Lintang Selatan dengan 450 M ketinggian DPL (Diatas Permukaan Laut). Luas wilayah Kalurahan Widodomartani sebesar 615 Ha. Jarak kalurahan Widodomartani ke kecamatan Ngemplak kurang lebih 100m. Kemudian, jaraknya kalurahan Widodomartani ke pusat kabupaten Sleman sekitar 15km. Sedangkan, jarak ke pusat Daerah Istimewa Yogyakarta (tengah kota Yogyakarta) kurang lebih 20km.

Pemerintah Kalurahan Widodomartani memiliki strategi pembangunan kalurahan yang tak lepas dari visi sebagai tujuannya dan potensi sebagai elemen pendukungnya. Strategi yang pemerintah kalurahan Widodomartani menerapkan cara pembangunan partisipatif. Melalui strategi ini, pembangunan dapat selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, muncul kegiatan prioritas yang berangkat dari bawah sebagai locus dari pelaksanaan pembangunan kalurahan Widodomartani.

Saat ini kalurahan Widodomartani dipimpin oleh Lurah Heruyono, ST. Kalurahan Widodomartani mengusung visi 'Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Widodomartani Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Mandiri, Agamis, Yang Berbasis Pada Sektor Pertanian, Perdagangan, UMKM, dan Budaya'. Tak terlepas dari visi yang di usung, kalurahan ini memiliki banyak sekali potensi. Visi ini terlihat dari potensi kalurahan ini salah satunya di bidang ekonomi masyarakat. Dalam bidang ini terdapat lahan pertanian yang subur, SDM yang potensial di usia kerja, lahan perikanan yang luas, dan wisata alam serta budaya.

Gambar 2
Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Widodomartani



Sumber : Profil Kalurahan Widodomartani Tahun 2019 di modifikasi sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan.

Gambar II.I diatas menunjukkan tingkat jabatan Pemerintah Kalurahan Widodomartani, Lurah atau Kepala Desa langsung membawahi atau hubungannya

bersifat komando dengan Carik atau Sekretaris Kalurahan, Seksi (keamanan, kemakmuran, dan sosial) serta ke Dukuh, sedangkan antar seksi bersifat koordiansi. Kemudian Carik membawahi Kepala Urusan (keuangan, tata usaha dan umum, dan perencanaan) bersifat komando sedangkan antar kepala urusan hubungannya bersifat koordinasi. Kalurahan Widodomartani merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sebutan untuk jabatan maupun nama desa di ganti agar memiliki karakteristik sendiri sebagai pemerintahan yang terletak di Kraton Yogyakarta. Sebutan ini di ambil dari penyebutan dalam struktur Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

1. Lurah (Kepala Desa)
2. Carik (Sekretaris Desa)
3. Jagabaya (Kepala Seksi Pemerintahan)
4. Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)
5. Kamituwa (Kepala Seksi Pelayanan)
6. Danarta (Kepala Urusan Keuangan)
7. Tata Laksana (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)
8. Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
9. Dukuh (Padukuhan)

Adapun nama-nama perangkat Kalurahan Widodomartani dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Daftar Nama Aparatur Pemerintah Kalurahan Widodomartani

No	Nama	L/P	Jabatan
1.	Heruyono, ST	L	Lurah
2.	Taufiq Wahyu Widodo, S.H	L	Carik
3.	Etty Winarni	P	Jagabaya
4.	Tri Kogam Maliki, S.Pd	L	Ulu-ulu
5.	Susilo Widodo, Ssi	L	Kamituwa
6.	Sigit Ari Wibowo, SE	L	Kaur. Danarta
7.	Anwar Siswanto	L	Kaur. Tata Laksana
8.	Yuda Nurdianto	L	Kaur. Pangripta
9.	Suryanto	L	Dukuh Blambangan
10.	Drs. Yuniawan Eko Putro	L	Dukuh Kalijeruk I
11.	Tri Handoko	L	Dukuh Kalijeruk II
12.	Deni Dwi Harjanto	L	Dukuh Ganjuran
13.	Wahadi	L	Dukuh Klancingan
14.	Tri Hartono	L	Dukuh Jimat
15.	Saryadi	L	Dukuh Jangkang
16.	Kismadi	L	Dukuh Dalem
17.	Haryono	L	Dukuh Jetis
18.	Sumadiyono	L	Dukuh Banglen
19.	Kulup Jaka Umbaran	L	Dukuh Kabunan
20.	Lingga Gupito	L	Dukuh Kemasari
21.	Suharsono	L	Dukuh Karang
22.	Sri Yulianti	P	Dukuh Ngalian
23.	Nanang Sujatmiko	L	Dukuh Kwadungan
24.	Joko Wiranto, S.H., M.H.	L	Dukuh Karanganyar
25.	Amanda Pungky Pratama	P	Dukuh Pucangan
26.	Priangga Arda Priguna	L	Dukuh Pondok I
27.	Suhamto	L	Dukuh Pondok II
28.	Eka Yuli Budi Winarta, S.H.	L	Staf
29.	Prabowo	L	Staf
30.	Dyah Ekasari	P	Staf
31.	Sunardi	L	Staf
32.	Wartono	L	Tukang Kebun
33.	Linda Ayu Dwi S.	P	Staf
34.	Tauqit Satriyo Wibowo	L	Staf
35.	Eviana Rahmawati	P	Staf

Sumber : Profil Kalurahan Widodomartani Tahun 2020

Jumlah penduduk Kalurahan Widodomartani menurut jenis kelamin sejumlah 9.640 jiwa dan perempuan sejumlah 4.845 jiwa, seperti dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Laki-laki	4.795	49,75
2.	Perempuan	4.845	50,25
Jumlah		9.640	100

Sumber : Profil Kalurahan Widodomartani Tahun 2019

Dari tabel II.III di atas memperlihatkan bahwa, jumlah penduduk Kalurahan Widodomartani jumlah terbanyak ditempati pada posisi perempuan dengan jumlah persentase sebesar 50,25% dari jumlah keseluruhan yaitu sebesar 9.640 jiwa, 49,74% laki-laki atau sebesar 4.795 jiwa.

Jumlah komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan akan mempresentasikan riwayat pendidikan penduduk suatu wilayah. Manfaat komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk menghitung dan mengetahui potensi sumber daya manusia dan juga potensi tenaga kerja terdidik suatu wilayah. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Taman Kanak-Kanak	800	8%
2.	Sekolah Dasar	1.362	14%
3.	Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	1.697	18%
4.	Sekolah Menengah Atas/ sederajat	3.931	41%
5.	Akademik (D1-D3)	865	9%
6.	Pendidikan Tingkat Tinggi (S1-S3)	985	10%
Total		9.640	100%

Sumber : Profil Kalurahan Widodomartani Tahun 2019

Dari data jumlah tingkat pendidikan di Kalurahan Widodomartani pada tabel di atas cukup baik, walaupun pada tingkat pendidikan tertinggi masih pada level Sekolah Menengah Atas/ sederajat, dibandingkan dengan tingkat pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini sudah dapat dikatakan cukup untuk mengangkat setiap potensi yang ada di Kalurahan Widodomartani, mengingat sumberdaya manusia merupakan unsur terpenting dalam proses pembangunan setiap wilayah.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Widodomartani dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Mata Pencaharian Masyarakat Widodomartani

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Petani	944	9,79%
2.	Buruh Tani	333	3,45%
3.	Pemilik Usaha Tani	1983	20,57%
4.	Buruh Perkebunan	134	1,39%
5.	Pemilik Usaha Perkebunan	89	0,92%
6.	Nelayan	46	0,48%
7.	Buruh Usaha Perikanan	59	0,61%
8.	Buruh Usaha Pertambangan	11	0,11%
9.	Pemilik Usaha Pertambangan	3	0,03%
10.	Tukang Batu	459	4,76%
11.	Tukang Kayu	368	3,82%
12.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	1089	11,30%
13.	Karyawan Perusahaan Swasta	3560	36,93%
14.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	98	1,02%
15.	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	108	1,12%
16.	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	114	1,18%
17.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	87	0,90%
18.	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	22	0,23%
19.	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	14	0,15%
20.	Kontraktor	12	0,12%
21.	Pensiunan TNI/POLRI	16	0,17%
22.	Peternakan Perorangan	8	0,08%
23.	Buruh Usaha Peternakan	45	0,47%
24.	Pemilik Usaha Perikanan	38	0,39%
Total		9.640	100,00%

Sumber : Profil Kalurahan Widodomartani Tahun 2019

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa, jenis mata pencaharian penduduk Kalurahan Widodomartani cukup beragam. Hal ini tidak dapat terlepas oleh kondisi geografis suatu wilayah dan keahlian masing-masing setiap orang di Kalurahan Widodomartani yang mempengaruhinya. Adapun jumlah penduduk

berdasarkan mata pencaharian yang mendominasi yakni, karyawan perusahaan swasta sebesar 3560 jiwa, pemilik usaha tani sebesar 1983 jiwa, pengerajin industri rumah tangga sebesar 1089 jiwa dan petani 944 jiwa, secara data tabel diatas dapat artikan mata pencaharian mayoritas kalurahan widodomartani adalah karyawan, *home industry* dan pertanian.

Kalurahan Widodomartani terkenal dengan potensi wisata alamnya, yakni sungai alami yang dimodifikasi oleh warga. Sungai ini mulai terkenal pada tahun 2014 dengan nama Blue Lagoon. Potensi alam yang sangat membantu perputaran ekonomi warga, khususnya padukuhan Dalem, dan secara umum warga Kalurahan Widodomartani. Dalam menemukan potensi-potensi di tiap sudut kalurahan, Pemerintah Kalurahan mengoptimalkan para lembaga kemasyarakatan desa dan selalu bekerja sama dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang bernama Pokdarwis Wisesa Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman, DIY.

B. Gambaran Umum Blue Lagoon

Blue Lagoon adalah salah satu potensi wisata alam yang berada di Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman, DIY. Blue Lagoon ini nama sungai alami yang telah banyak mengalami perubahan fisik dan menjadi daya tarik wisata sekaligus menjadi ladang rezeki warga kalurahan Widodomartani. Jauh sebelum diberi nama Blue Lagoon, ternyata asal muasal tempat wisata ini cukup mencengangkan. Nama sebenarnya adalah sungai ‘Tirta Budi’. Nama ‘Budi’

adalah seseorang yang tewas tenggelam akibat penyakit epilepsi yang dideritanya. Blue Lagoon lokasi lebih tepatnya di padukuhan Dalem.

Blue Lagoon mulai populer sekitar tahun 2014, namun diresmikan pada tahun 2015 oleh Sri Purnomo (Bupati Sleman) pada hari air sedunia. Blue lagoon sendiri sebetulnya adalah sumber mata air untuk mengairi sawah. Mulanya di 2014 Blue Lagoon dibersihkan oleh kuliah kerja nyata dari universitas gajah mada (KKN UGM). Lalu, dibuka untuk pemandian yang bernama 'Tirta Budi' seperti diatas. Mulai 2015, desa Widodomartani menjadi desa wisata dibawah arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Blue Lagoon inilah banyak memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan hidup warga kalurahan Widodomartani.

Sejarahnya, di kalurahan Widodomartani terdapat tiga buah mata air, yakni sendang wadon, belik kluwih, dan sendang lanang. Ketiganya ini ada di sungai tepus. Sendang wadon itu berupa bilik dan kolam kecil untuk pemandian perempuan. Sementara belik kluwih dan sendang lanang muncul sebagai pancuran dari tepi sungai. Belik kluwih airnya berkumpul dan membentuk kedung, terus sendang lanang berbentuk kolam kecil (mandi pria). Kedung ini yang disebut dan dikenal dengan nama blue lagoon, yang artinya air biru nan jernih.

Mata air yang alami dan jernih, berwarna biru ini menjadi ke-khas-an dari Blue Lagoon. Saat ini, bila kita berkunjung, kita akan melihat gelembung yang tandanya ada air muncul dari bawah. Kemudian, pemandangan pohon bambu yang bening dan hijau bertambah dengan sejuknya angin. Kolam di Blue Lagoon itu cukup dalam dan warga telah memberikan spot khusus. Bagi wisatawan yang ingin

bermain air dengan melompat dari ketinggian pun sudah di sediakan. Sehingga, aman dan nyaman diprioritaskan di tempat ini. Meskipun sejarahnya berbicara orang tenggelam.

Biaya untuk masuk dan menikmati indahnya wisata ini relatif cukup murah. Hanya dengan 5ribu rupiah (3 ribu tiket masuk dan 2 ribu parkir). Fasilitas yang ada di Blue Lagoon juga lumayan lengkap. Ada wahana bermain anak, kamar madni, kolam renang, mushola, parkir, warung makan, dan gazebo. Blue Lagoon tentunya bukanlah tempat wisata yang liar dan bebas. Namun, ada pengurus yang mengurus wisata ini. Karena, wisata ini adalah ladang rejeki bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Uang banyak terkumpul melalui Blue Lagoon dan untuk berputar satu desa.

Warung makan, wahana bermain, tempat sewa perlengkapan berenang adalah milik warga yang dikelola bersama pengelola Blue Lagoon. Tempat wisata ini menjadi fokus tersendiri untuk urusan rejeki warga khususnya padukuhan Dalem. Berdasarkan wawancara dengan Sahadi, seorang ketua pengelola wisata Blue Lagoon disampaikan

“...Blue Lagoon ini sekarang menjadi salah satu sumber kehidupan atau pendapatan yang berarti bagi masyarakat. Blue Lagoon ini ada bagaikan rejeki nomplok masyarakat, beruntung ada mata air di sini”
(Wawancara pada 27 Desember 2022)

Pengelolaan Blue Lagoon juga tidak sembarangan, ada struktur yang mengelola ini. Diketahui oleh Bapak Sahadi dan rekan-rekan pengurus menjadikan Blue Lagoon masih eksis dan terus berbenah menjadi objek wisata yang keren.

Setidaknya ada Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Konsumsi, Akomodasi, Atraksi, Keamanan dan P3K, Kebersihan, Tim Kreatif, dan Tim Marketing. Seluruh komponen ini yang sangat menopang jalannya Blue Lagoon dan terus mengandeng masyarakat. Adapun gambaran strukturnya sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Blue Lagoon



Sumber: Olahan Data

Dari bagan struktur diatas ketua pengelola berdiri sebagai pucuk pimpinan untuk menselaraskan kerja-kerja pengelolaan blue lagoon, dibantu sekretaris secara administrasi, dan bendahara secara keuangan. Seksi konsumsi lebih banyak mengelola kegiatan terkait dengan makanan, minuman, snack, dan lain sebagainya. Seksi Akomodasi ditekankan pada fasilitas untuk wisatawan yang menginap. Seksi Atraksi lebih kepada memantau dan memastikan kegiatan berjalan lancar atau tidak. Seksi keamanan turut menjaga keamanan dan P3K sebagai pertolongan pertama bila ada kejadian tak terduga. Seksi Kebersihan untuk kebersihan wisata.

Ada dua tim yang tergolong baru dibentuk dan menjadi bagian dari struktural, yakni tim kreatif dan marketing. Tim Kreatif lebih banyak di isi oleh golongan

muda untuk mengemas blue lagoon semakin indah dan cantik. Sehingga, punya daya tarik yang lebih lagi. Hal semacam ini disambut oleh Tim Marketing yang khusus untuk bagaimana caranya Blue Lagoon lebih dikenal oleh khalayak ramai. Pengelolaan Blue Lagoon dengan hadirnya dua badan/ seksi/ tim yang baru menunjukkan ada hal adaptif dan responsif untuk pengembangan wisata.s

Daftar Pustaka

- Arida, S. (2017). *Ekowisata: pengembangan, partisipasi lokal, dan tantangan ekowisata*. Pers Cakra.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Putra Grafika. Jakarta.
- Bogdan, dan Taylor. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291-303.
- Febrianti, S. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata “Blue Lagoon” Dalem Widodomartani N Gemplak Sleman. *Geo Educasia-SI*, 2 (6), 788-806.
- Gautama, BP, Yuliawati, AK, Nurhayati, NS, Fitriyani, E., & Pratiwi, Iic. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (4), 355-369.
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429-437.
- HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairunnisa, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Blue Lagoon, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Pemberdayaan Islam: IMEJ*, 1 (2), 205-216.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerjasama dengan International Labour Organization.

- Kementerian Pariwisata. (2019). *Buku Pedoman Wisata Desa*. Jakarta. Edisi I. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Edisi Cetakan ke tujuh, Jakarta: PT Rajawali Pres.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6 (3), 45-55.
- Moleong Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*, (edisi revisi, cetakan kedelapan), Penerbit CV. ALFABETA, Bandung.
- Saputra, AD (2021). Implementasi Penerapan Protokol New Normal Pada Destinasi Wisata Di Kabupaten Sleman. *Media Wisata* , 19 (2), 217-234.
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109-129.
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1 (1), 22-26.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (cetakan kedua belas). Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. (2009). *Manajemen Pemerintahan: Plus Dua Belas Langkah Strategis*, Tangerang: CV. Media Brilian.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). *Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pariwisata Budaya di Taman Hutan Raya Banten*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tou, H. J., Noer, M., & Lenggogeni, S. (2022). Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*, 10(02), 95-101.
- Tyas, NW, & Damayanti, M. (2018). Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan*, 2 (1), 74-89.
- Utang, Rosidin. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, :Bandung.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *Kepariwisata*. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 *Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan*. 7 Juli 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781. Jakarta.

Keputusan Lurah Widodomartani Nomor 33 Tahun 2022. *Pembentukan Kelompok Sadar Wisata "WISESA" Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman*. 25 November 2022. Widodomartani.

Internet:

Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Telah Memasuki Babak Baru
<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Anugerah-Desa-Wisata-Indonesia-2021-Telah-Memasuki-Babak-Baru>

Blue Lagoon Suguhkan Destinasi Wisata Air Baru
<http://www.slemankab.go.id/6816/blue-lagoon-suguhkan-destinasi-wisata-air-baru.slm>

Situasi Covid-19 Indonesia (<https://covid19.go.id/artikel/2022/04/25/situasi-covid-19-di-indonesia-update-25-april-2022>)

Pasien Korona Kabupaten Sleman
(<https://corona.slemankab.go.id/index.php/category/pasien/>).

Ketar-Ketir Desa Wisata Sambut PPKM level 3
(<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/11/25/512/1089139/ketar-ketir-desa-wisata-sambut-ppkm-level-3>).

Website Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman
<https://widodomartanisid.slemankab.go.id>

Data Wawancara:

Transkrip Hasil Wawancara Dengan Lurah Widodomartani

Transkrip Hasil Wawancara Dengan Dukuh Dalem

Transkrip Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengelola Objek Wisata Blue Lagoon

Transkrip Hasil Wawancara Dengan Anggota Pengelola Objek Wista Blue Lagoon

Transkrip Hasil Wawancara Dengan Wisatawan Objek Wisata Blue Lagoon